

PENGANTAR : KONSEP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. **Stabilitas sistem keuangan** adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap guncangan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Kerentanan (*vulnerability*) sistem keuangan mengacu pada suatu kondisi ketidakseimbangan dalam sistem keuangan (*financial imbalances*) yang terjadi karena perilaku pengambilan risiko (*risk taking behaviour*) dari agen perekonomian dalam memaksimalkan keuntungan atau konsumsinya. Ketidakseimbangan ini antara lain dapat terlihat dari peningkatan kredit yang tidak sesuai dengan kapasitas perekonomian, perilaku prosiklikalitas perbankan, peningkatan konsentrasi risiko kredit pada sektor tertentu serta peningkatan utang luar negeri.

Jika terjadi guncangan, maka agen perekonomian dalam sistem keuangan yang sejak awal sudah dalam kondisi rentan akan mengalami peningkatan risiko yang dapat berujung pada risiko sistemik kepada sebagian atau seluruh sistem keuangan. **Risiko sistemik** adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).

Lebih lanjut, risiko sistemik memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *time series* dan dimensi *cross section*. **Dimensi time series** adalah dimensi runtun waktu yang menekankan pada bagaimana risiko dalam sistem keuangan berevolusi sepanjang waktu, termasuk evolusi yang mengikuti siklus perekonomian. Sedangkan **dimensi cross section** adalah dimensi antar subjek yang mencerminkan bagaimana risiko terdistribusi dalam sistem keuangan pada satu periode tertentu yang disebabkan oleh secara individual atau sektoral terdapat risiko konsentrasi (*concentration risk*) dan kesamaan eksposur (*common risk factor*) dan/atau risiko tertularnya gangguan antar individu/sektor karena keterkaitan dalam sistem keuangan (*contagion risk*).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan sebuah kebijakan yang memitigasi risiko sistemik dan bertujuan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan yang disebut sebagai **kebijakan makroprudensial**. Kebijakan makroprudensial memiliki fokus pada risiko dalam sistem keuangan secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada risiko masing-masing individu pelaku keuangan.

Salah satu indikator yang dijadikan acuan untuk merumuskan kebijakan makroprudensial adalah **siklus keuangan** yang menggambarkan *boom* dan *bust* keuangan. Idealnya, saat kondisi *boom*, kebijakan makroprudensial akan diatur sedemikian rupa untuk mengurangi amplitudo *boom* tersebut. Hal ini dilakukan karena pada umumnya, periode *boom* yang tidak terkontrol akan berujung pada *bust* atau bahkan krisis keuangan. Sebaliknya, ketika kondisi *bust*, akan dilakukan pelonggaran (*loosening*) kebijakan makroprudensial, untuk membantu perekonomian bangkit kembali.

Untuk mendukung kebijakan makroprudensial tersebut, diperlukan beberapa alat (*tools*) untuk mengukur risiko sistemik seperti Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK), *top down stress test*, *network analysis* dan/atau alat ukur lainnya. ISSK merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kestabilan dan ketahanan Sistem Keuangan Indonesia terhadap tekanan risiko. ISSK dibangun atas 2 (dua) indeks yaitu Indeks Stabilitas Pasar Keuangan (ISPK) dan Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK). Selanjutnya, *Top down stress test* adalah *industry-wide stress test* yang dilakukan oleh bank sentral melalui peranan parameter variabel makro yang sama untuk semua bank.

Adapun beberapa instrumen kebijakan makroprudensial yang telah diterbitkan BI adalah sebagai berikut:

- a. **Countercyclical Capital Buffer (CCB)** yaitu tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Ketika kondisi ekonomi sedang ekspansi, besaran CCB dapat ditingkatkan sebagai cadangan modal yang dapat digunakan perbankan ketika kondisi ekonomi kontraksi.
- b. **Loan to Value Ratio (LTV Ratio)** yaitu rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunannya. LTV merupakan instrumen kebijakan makroprudensial credit related dan dikembangkan untuk memitigasi risiko yang muncul dari perilaku excessive lending dan bubble harga properti pada periode 2010 -2011.
- c. **Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)** yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan Giro Wajib Minimum terhadap *Loan-to-Funding Ratio (GWM-LFR)*. RIM adalah instrumen kebijakan makroprudensial yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi intermediasi tanpa melupakan pengendalian risiko likuiditas. Indikator utama yang diperhatikan dalam instrumen ini adalah rasio pembiayaan terhadap pendanaan. Pada dasarnya, RIM memperluas cakupan pembiayaan sehingga tidak hanya memperhitungkan kredit yang disalurkan tetapi juga memperhitungkan Surat-Surat Berharga (SSB) korporasi non-keuangan yang dimiliki oleh bank.
- d. **Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)** adalah instrumen kebijakan makroprudensial yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas perbankan. PLM bersifat *countercyclical* dan *time-varying* dan diterapkan pada seluruh bank, untuk melengkapi instrumen mikroprudensial likuiditas LCR dan NSFR yang saat ini masih hanya diterapkan oleh OJK pada bank BUKU 3 dan 4 serta bank dengan kepemilikan asing (termasuk KCBA).

Kebijakan makroprudensial juga perlu memperhitungkan perkembangan teknologi yang melahirkan inovasi teknologi di bidang keuangan yang biasa dikenal dengan **financial technology (TekFin)**. Inovasi yang dicakup dalam TekFin adalah inovasi keuangan yang menghasilkan model bisnis, proses, atau produk keuangan baru serta memiliki dampak secara signifikan kepada pasar dan institusi keuangan. Bank Indonesia akan terus mengeluarkan kebijakan yang memaksimalkan perkembangan TekFin dengan mitigasi risiko yang memadai. Sebagai contoh, BI aktif dalam mendorong elektronifikasi, serta telah mengeluarkan ketentuan mengenai *virtual-currency* yang dikhawatirkan dapat memberikan risiko bagi sistem keuangan Indonesia.

Note: Untuk pemahaman lebih lanjut terkait Makroprudensial, baca buku "Mengupas Kebijakan Makroprudensial" (<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/serbaserbi/Documents/Makroprudensial.pdf>)